

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 10	No. 1	Hal. 1 - 90	Jakarta Juni 2020	ISSN 2089-6980
--------------------------------	---------	-------	-------------	----------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : 30/E/KPT/2018

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Keluatan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Keluatan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 10 Nomor 1, Juni 2020

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*)

Anggota:

Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Dr. Armen Zulham (Sistem Usaha Perikanan)

Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan
dan Sumberdaya Perikanan*)

Dr. Rani Hafsatidewi, S.K.M., M.Si. (Sistem Usaha Perikanan)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :

Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A.

Nila Mustika Wati, S.S.

Dr. Irwan Muliawan

Nendah Kurniasari, M.Si.

Permana Ari Soejarwo, M.T.

Edwin Yulia Setyawan, S.T.

Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S. Ikom.

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: kebijakan.sosek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Analisis Bioekonomi Perikanan Tuna Sirip Kuning di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Indonesia; (ii) Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Natuna; (iii) Peran Perikanan Tangkap Skala Kecil Dalam Pembangunan Kawasan di Weru Komplek, Kabupaten Lamongan; (iv) Strategi Pengendalian Impor Mackarel Sebagai Bahan Baku Usaha Pemindangan; (V) Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia dan Malaysia dan Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik di Kalimantan Utara; (vi) Pengaruh Penerapan ‘Papadak’ Terhadap Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Konservasi Laut di Rote Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan; (vii) Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 10 Nomor 1, Juni 2020 adalah:

1. Prof. Dr. I Wayan Rusastra (*Ekonomi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*)
2. Prof. Dr. Zuzy Anna (*Ekonomi sumber Daya Alam - Universitas Padjajaran*)
3. Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab (*Ekonomi Sumberdaya Perikanan - Universitas Brawijaya*)
4. Dr. Rilus A Kinseng (*Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University*)
5. Dr. Ir. Achmad Fahrudin, M.Si (*Pengelolaan Pesisir - IPB University*)
6. Dr. Yesi Dewita Sari, S.Pi., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
7. Dr. Ir. Edi Susilo, MS. (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
8. Dr. Taryono (*Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - IPB University*)
9. Suadi, Ph.D (*Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Universitas Gajah Mada*)
10. Akhmad Solihin, S.Pi. M.H (*Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap - IPB University*)
11. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
12. Drs. Kusnadi, M.A (*Antropolog Maritim - Universitas Jember*)
13. Trisnani Dwi Hapsari, SPi, M.Si (*Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan - Universitas Diponegoro*)

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 10 Nomor 1, Tahun 2020

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA, KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA	
<i>Oleh : Pratita Budi Utami, Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda</i>	1 - 10
PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA	
<i>Oleh : Meirina Anggraeni, Ernan Rustiadi, dan Gatot Yulianto</i>	11 - 23
PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI WERU KOMPLEK, KABUPATEN LAMONGAN	
<i>Oleh : Budi Wardono1 dan Toha Muslih</i>	25 - 38
STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN	
<i>Oleh : Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati</i>	39 - 52
DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA	
<i>Oleh : Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah</i>	53 - 63
PENGARUH PENERAPAN ‘PAPADAK’ TERHADAP PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR	
<i>Oleh : Zahra Muthmainnah, Ade Suryanda, Ratna Komala, Karina Aprilia, dan Rahmad Hidayat ...</i>	65 - 75
KONSTITUTIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH	
<i>Oleh : Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah</i>	77 - 90

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)**

Vol. 10 No. 1, Juni 2020

**ANALISIS BIOEKONOMI PERIKANAN TUNA SIRIP KUNING DI LARANTUKA,
KABUPATEN FLORES TIMUR, INDONESIA**

Bioeconomic Analysis of Yellowfin Tuna Fishery in Larantuka of East Flores Regency, Indonesia

Pratita Budi Utami, Tridoyo Kusumastanto, Nimmi Zulbainarni, dan Nisa Ayunda

ABSTRAK

Tingginya permintaan tuna sirip kuning baik dalam memenuhi kebutuhan pasar mancanegara dan pasar lokal, berdampak pada keberlanjutan perikanan tuna tersebut. Wilayah perairan Flores Timur adalah salah satu lokasi migrasi bagi tuna sirip kuning; Kecamatan Larantuka merupakan tempat pendaratan terpenting bagi nelayan lokal *handline* tuna sirip kuning. Kegiatan perikanan tuna sirip kuning ini merupakan salah satu pendapatan utama bagi nelayan lokal dan pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat eksploitasi dan menganalisa rezim pemanfaatan dari perikanan *handline* tuna sirip kuning di Larantuka, Flores Timur. Model bioekonomi Fox dan Copes digunakan dalam penelitian untuk menganalisa tingkat lestari sumber daya tuna ekor kuning dari pendekatan *input* dan *output*. Hasil estimasi dari kedua model menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna sirip kuning oleh nelayan lokal *handline* masih dalam zona lestari secara ekonomi dan ekologi. *Maximum economic yield* (MEY) merupakan strategi terbaik untuk mengelola keberlanjutan perikanan tuna sirip kuning di perairan Flores Timur. Melalui pengelolaan rezim MEY diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 30 orang, peningkatan armada alat penangkapan sebanyak 25 unit dan pemasukan keuntungan secara ekonomi sebesar Rp68.123.060.000,00 per tahun.

Kata Kunci: model bioekonomi; model copes; model fox; surplus produksi; tuna sirip kuning; Flores

ABSTRACT

The high demand for yellowfin tuna both in national and international markets has a consequence to the fish resources sustainability. Eastern Flores water is a major area of this tuna mobility; the district of Larantuka is the central port for local yellowfin tuna *handline* fisheries. These activities are substantial incomes for the local community and regional government. This study, therefore, aims to calculate fish exploitation level and to analyze appropriate management for yellowfin tuna fisheries in Larantuka, East Flores. The bioeconomics Fox and Copes models are used to evaluating the optimal fisheries from input and output approaches. The models' applications demonstrated that yellowfin tuna *handline* fisheries are currently estimated sustainable both in ecology and economics. During the study period, the maximum economic yield (MEY) is a recommended strategy to manage yellowfin tuna fisheries in Larantuka, Eastern Flores. The strategy contributes to increasing the number of workers about 30 people, the number of fishing fleets about 25 units and reaching the economic rent IDR 68.123.060.000,00 in a year.

Keywords: *bioeconomic model; copes model; fox model; surplus production; tuna fishery; Flores*

PERANAN SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN NATUNA

Role of Fisheries Sector to Economy of the Natuna Regency

Meirina Anggraeni, Ernan Rustiadi, dan Gatot Yulianto

ABSTRAK

Kabupaten Natuna sebagai daerah pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam yang besar khususnya perikanan. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan wilayah Kabupaten Natuna. Salah satu alternatif menggerakkan dan memacu pembangunan wilayah adalah menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterkaitan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah berdasarkan kelengkapan infrastruktur wilayah, menganalisis keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*) sektor perikanan dan menganalisis seberapa besar peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Natuna. Analisis data yang digunakan adalah Skalogram dan *Input-Output* (*I-O*). Hasil penelitian menunjukkan kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah Kecamatan Bunguran Timur dan Pulau Tiga. Sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan *real estate* dan jasa perusahaan termasuk ke dalam sektor unggulan karena memiliki daya penyebaran ke belakang dan daya kepekaan terhadap permintaan akhir sektor-sektor perekonomian. Sementara sektor perikanan belum menjadi sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak secara langsung perekonomian di Kabupaten Natuna. Upaya untuk mendorong keterkaitan antar sektor perikanan dengan sektor perekonomian wilayah dengan pengembangan industri hilir yang memanfaatkan output kegiatan perikanan sebagai bahan baku produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung dan difokuskan pada lokasi yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan.

KataKunci: **input-output; keterkaitan antar sektor; pengembangan wilayah; perikanan; skalogram**

ABSTRACT

Natuna Regency is a potential area with great amount of fisheries resources. Its fisheries resources are expected to encourage the development within the regency. The establishment of economic growth center and increased linkages among sectors were suggested to accelerate the regional development. This study aims to analyze the level of regional development based on the completeness of regional infrastructure, to analyze the backward and forward linkages of the fisheries sector and to measure the role of fisheries in economy of Natuna Regency. Scalogram and Input-Output were used for data analysis. The results suggested two districts as a center of economic growth, they are Bunguran Timur District and Pulau Tiga. Instead of fisheries sector, the manufacturing, accommodation, food and beverage, transportation, warehousing, financial and insurance services, real estate and company services were the leading sectors due to their backward deployment and sensitivity to the final demands of the economic sectors. Efforts to encourage linkages between fisheries and other regional economic sector are necessary through the development of downstream industries. It includes the directly and indirectly use of fisheries outputs as raw material for production in the focus area of centers of growth.

Keywords: **input-output; sectoral linkages; regional development; fisheries; growth centre; scalogram**

PERAN PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN DI ‘WERU KOMPLEK’, KABUPATEN LAMONGAN

Role of Small-scale Fishery in the Regional Development of ‘Weru Complex’, Lamongan Regency

Budi Wardono dan Toha Muslih

ABSTRAK

Pengembangan perikanan skala kecil diarahkan untuk menciptakan keterkaitan yang kuat dengan sektor lain. Keterkaitan untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang akhirnya mampu menumbuhkan perekonomian lokal. Selama ini peranan tengkulak masih sangat dominan, di sisi lain peranan istri/wanita nelayan semakin penting. Istri nelayan nelayan memainkan peranan dalam pengelolaan hasil usaha penangkapan. Semakin pentingnya peranan istri nelayan dalam pengelolaan usaha penangkapan dapat mengurangi dominasi tengkulak/‘langgan’ dalam sistem bisnis perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perikanan kecil dan peran “mapak” oleh istri nelayan. Penelitian dilakukan di Kawasan Weru Komplek, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, pada bulan Januari-April tahun 2015 dan November 2019. Data yang digunakan adalah data primer pelaku usaha yang meliputi usaha penangkapan, pemasaran, pengolahan produk dan peranan “mapak” istri nelayan dalam manajemen usaha. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, hasilnya dalam bentuk tabel dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik nelayan dan kondisi sumberdaya menentukan perilaku terhadap pemanfaatan sumberdaya. Interaksi tersebut sebagai sumber kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Perikanan skala kecil mampu menjadi penggerak perekonomian wilayah di Weru kompleks melalui kemampuannya menggerakkan keterkaitan ke belakang dan kedepan (*upstream and downstream*). “Mapak” merupakan peran yang dilakukan Isteri nelayan dalam manajemen usaha hasil penangkapan yaitu melakukan grading, pemasaran, pengolahan produk dan yang paling utama adalah pengelolaan keuangan hasil usaha. Istri nelayan/wanita nelayan juga memainkan peranan dalam pembentukan modal melalui arisan, tabungan dan permodalan KUR. Keberhasilan istri nelayan/wanita nelayan menjalankan fungsi “mapak” mampu mengurangi dominasi peran tengkulak/‘langgan’ dalam usaha perikanan.

KataKunci: perikanan skala kecil; ekonomi lokal; “mapak”; tengkulak; KUR

ABSTRACT

Small-scale fisheries development is directed to create strong linkages with other sectors. Linkages to increase added value, employment and incomes are ultimately expected to grow local economy. By far, middlemen have been playing dominant role, but on the other hand, the role of both fishers' wives and women fishers have been increasingly significant. These women contributed to the management of fishing results. The more significant of their role the more reducing the dominance of middlemen in the fisheries business system. The research objective was to analyze the role of small-scale fisheries and the role of “mapak” by fishers' wives. The study was conducted in Weru Complex, Paciran Subdistrict, Lamongan District, in January to April 2015 and November 2019. The study used primary data that were collected from business actors from fishing, marketing, product processing sector and the role of “mapak” in business management. Data were analyzed with descriptive method, and the results were described in tables and figures. The results suggested that fishers' characteristics and resources condition determine the behaviour towards resources. This interaction is a source of economic activity which is able to encourage local economic growth. Small-scale fisheries is able to drive regional economic in Weru complex through its ability to move backward and forward linkages (upstream and downstream). “Mapak” is the role of fishers' wives in the management of fish caught including grading, marketing, product processing and especially in the financial management of the activities. Furthermore, they also contribute to capital arrangement through social gathering, savings, and bank capital. Their succeed role eventually reduce the dominance of the role of middlemen / customers in fishery business.

Keywords: *small-scale fisheries; local economy; “mapak”; middlemen; KUR*

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Mackarel Importation Control Strategy As Raw Material For Boiled Fish Industries

Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati

ABSTRAK

Ikan mackerel merupakan salah satu komoditas impor utama pada sektor perikanan sehingga pengendalian impor terhadap komoditas ini dapat berperan mengurangi defisit neraca perdagangan. Peruntukkan impor mackerel sebagian besar untuk usaha pemindangan dan pasar domestik sebagai substitusi ikan lokal. Pengendalian impor terhadap ikan makarel sangat penting dilakukan karena merupakan pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan mackerel khususnya pada usaha pemindangan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait usaha pemindangan yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai sentra pemasukan ikan mackerel impor. Analisis data menggunakan metode *analysis hierarchi process* (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel bagi usaha pemindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang menjadi prioritas pertama adalah memperbaiki sistem logistik dan distribusi ikan lokal dengan bobot nilai sebesar 0,378. Prioritas kedua adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan dengan bobot nilai sebesar 0,233. Prioritas ketiga adalah peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan impor mackerel dengan bobot nilai sebesar 0,215 dan prioritas keempat adalah edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin dengan bobot nilai sebesar 0,174. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku ikan lokal menjadi stabil dengan tingkat harga yang sesuai bagi pemindang sehingga alokasi impor mackerel yang dikeluarkan untuk usaha pemindangan dapat dikurangi secara bertahap.

Kata Kunci: **usaha pemindangan; impor mackerel; strategi impor; bahan baku lokal; substitusi impor**

ABSTRACT

Mackerel is one of the largest import commodities in the fisheries sector. Therefore, control over mackerel import helps reducing Indonesia's trade balance deficit. Mackerel were imported largely for fish brine industries and domestic market as a substitute for local fish. The import control especially significant since it is a local fish competitor and it possibly reduces the demand of local fish. Therefore, this study aims to formulate strategies for controlling mackerel imports for fish brine industries. This study used primary data that were collected through interviews and discussions among stakeholders of fish brine industries from March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as centers of imported mackerel fish. Data then were analysed using Analytical Hierarchy Process (AHP) to formulate import control strategies of mackerel for fish brine industries. The results suggested strategies with four priority scales. The priority was improving the logistic and distribution system of local fish with a value of 0,378. The second priority was increasing the capacity of the fishing fleet with a value of 0,233. The third priority was reviewing the mechanism of recommendations, import licenses and controlling procedures with a value of 0,215. The fourth priority was education to community regarding to mackerel substitution and cold chain system with a value of 0,174. Those strategies were expected to increase the availability of local fish raw materials with appropriate price level for the brine fish businessmen in order to gradually reduce the number of imported mackerel for the brine fish industry.

Keywords: **brine fish industries; mackerel import, import strategy; local raw materials, impor substitution**

**DINAMIKA KESEPAKATAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA DAN PENGEMBANGAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)
SEBATIK DI KALIMANTAN UTARA**

***The Dynamics of Border Trade Agreement between Indonesia – Malaysia and the Development
Integrated Fishery Center (SKPT) Sebatik in North Kalimantan***

Bayu Vita Indah Yanti dan Umi Muawanah

ABSTRAK

Perdagangan lintas negara Malaysia - Indonesia telah berlangsung lebih dari 30 tahun sejak tahun 1970 dengan payung hukum kesepakatan perdagangan lintas negara (*The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*). Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan khusus untuk pengembangan ekonomi wilayah perbatasan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan terluar. Pulau Sebatik merupakan salah satu lokasi perbatasan yang sangat strategis untuk dikembangkan dan karena alasan tersebut, lokasi ini menjadi salah satu lokasi dari SKPT. Pembangunan SKPT Sebatik secara tidak langsung diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap perkembangan kerjasama sosial ekonomi Malaysia -Indonesia (Malindo), karena pembangunan SKPT memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Malindo. Tujuan paper ini membahas pengaruh Pengembangan SKPT Sebatik terhadap dinamika kesepakatan kerjasama perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data primer dan sekunder yang bersumber pada observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi kesepakatan kerjasama. Kajian menemukan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan SKPT Sebatik diperkirakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kerjasama perdagangan lintas batas Indoensia Malayasi yang selanjutnya lebih dikenal Sosek Malindo. Pengembangan SKPT akan meningkatkan nilai tawar posisi Indonesia dalam perundingan kerjasama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia khususnya terkait perdagangan produk hasil perikanan lintas negara Indonesia dan Malaysia.

KataKunci: perdagangan perbatasan; sosek malindo;
SKPT; Sebatik; perikanan

ABSTRACT

Cross-country trade agreement between Malaysia-Indonesia has lasted more than 30 years since 1970s under The Border Trade Agreement (BTA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia. In 2015, the government of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) had a policy for the economic development of the border areas for the development of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) on small and outermost islands. Sebatik Island is a very strategic border location to be. Therefore, Sebatik was chosen as one of the locations of the SKPTs. The Sebatik SKPT development will indirectly influence the development of Malaysian-Indonesian (Malindo) socio-economic cooperation. the SKPT development raises a new economic growth center in the Malindo border region. The purpose of this paper is to discuss the effect of the Development of Sebatik SKPT on the dynamics of cross-border trade agreements between Indonesia and Malaysia. The study uses qualitative method by analyzing primary and secondary data sourced from field observations, interviews and cooperation agreement documents. The study found that the development policy of the SKPT Sebatik is expected to have a positive influence on the cross-border Indonesian trade cooperation between Malaysia and Indonesia, which is later known as Sosek Malindo. The development of the SKPT will increase the bargaining value of Indonesia's position in the Indonesia-Malaysia socio-economic cooperation negotiations, especially related to the trade of fishery products across Indonesia and Malaysia.

Keywords: border trade; sosek malindo; SKPT;
Sebatik; fisheries

**PENGARUH PENERAPAN ‘PAPADAK’ TERHADAP PENGETAHUAN
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA UPAYA KONSERVASI LAUT
DI ROTE TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR**

*The Effect of ‘Papadak’ Implementation on Community Knowledge
and Their Participation in Marine Conservation in the Central Rote,
East Nusa Tenggara*

Zahra Muthmainnah, Ade Suryanda, Ratna Komala, Karina Aprilia, dan Rahmad Hidayat

ABSTRAK

‘Papadak’ merupakan kearifan lokal yang diterapkan untuk pengelolaan pesisir oleh masyarakat di Kecamatan Rote Tengah. Agenda yang dilaksanakan selama Papadak memberikan akses pengetahuan dan sarana untuk berpartisipasi kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018 di Desa Siomeda yang telah menerapkan Papadak dan Desa Maubesi yang belum menerapkan. Metode *ex post facto* dengan kearifan lokal Papadak sebagai variabel bebas dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat digunakan dalam penelitian ini. Sampel responden berusia 18-64 tahun dipilih secara acak sebanyak 88 orang dari Desa Maubesi dan 80 orang dari Desa Siomeda. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, wawancara informan kunci, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan uji-U Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengetahuan Desa Maubesi lebih tinggi dari Desa Siomeda, sedangkan rata-rata nilai partisipasi masyarakat menunjukkan hasil sebaliknya. Pengujian hipotesis menyimpulkan tidak ada pengaruh penerapan kearifan lokal Papadak terhadap pengetahuan dan partisipasi masyarakat pada upaya konservasi laut di Kecamatan Rote Tengah. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan dan partisipasi masyarakat dan cara untuk meningkatkannya.

Kata Kunci: kearifan lokal ‘Papadak’; kebijakan publik; pengelolaan pesisir; Laut Savu; Rote Ndao

ABSTRACT

‘Papadak’ is a local wisdom in the coastal management within community in Central Rote District. Papadak provided community with access to knowledge and opportunity to participate in marine conservation efforts. The purpose of this study was to determine the effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote. This study was conducted in September-October 2018 in Siomeda Village which had implemented Papadak compared with Maubesi Village which had not implemented Papadak. Method used *ex post facto* method. Random sampling was used to select 88 people from Maubesi and 80 people from Siomeda ranged between 18-64 years old. Data were collected through questionnaires, key informants interview, and document review. Data then were analysed by U-test. The results showed the higher average score of community knowledge in Maubesi rather than in Siomeda, while the average score of community participation showed the opposite result. This study concluded that there was no effect of Papadak on community knowledge and participation in marine conservation in Central Rote District. Further research is needed to discover other factors influencing community knowledge and participation and how to improve them.

Keywords: ‘Papadak’ local wisdom; public policy; coastal management; Savu Sea; Rote Ndao

KONSTITUSIONALITAS PERLINDUNGAN PETAMBAK GARAM MELALUI REGULASI DAERAH

Constitutionality of Salt Farmer's Protection Through Local Regulation

Encik Muhammad Fauzan, Indra Yulianingsih, dan Azizah

ABSTRAK

Pemerintah telah membentuk peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang ini perlu ditindak lanjuti dalam bentuk produk hukum dan kebijakan daerah agar petambak garam dapat merasakan manfaat dari peraturan-peraturan tersebut. Pada kenyataannya masih sangat sedikit daerah yang membentuk peraturan daerah (perda) untuk mewujudkan amanat undang-undang ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memberikan dasar perlindungan secara konstitusional bagi petambak garam dan mengetahui regulasi yang harus dibentuk pada tingkat daerah. Kajian ini menggunakan metoda penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Pola analisis yang digunakan dengan cara deduktif yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hasil penelitian ini adalah perlindungan dan pemberdayaan petambak garam telah ada secara tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk konstitusionalitas. Bentuk regulasi yang harus dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan kebijakan lain. Penelitian ini merekomendasikan daerah-daerah yang mempunyai tambak garam untuk membentuk regulasi tersebut yaitu peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dan peraturan kepala daerah seperti peraturan bupati terkait pedoman teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, dan optimalisasi industri garam lokal serta kebijakan daerah terkait tim pelaksana pemberdayaan petambak garam.

Kata Kunci: konstitusionalitas; perlindungan; pemberdayaan; petambak garam; regulasi

ABSTRACT

The government has established regulations related to the protection and empowerment of salt farmers through Law Number 7 of 2016. This law needs to be realized in the form of regional legal and other regional policies in order that salt farmers can benefit from this regulation. In fact, very few regions have formed local laws (perda) to realize the mandate of this law. The purpose of this study is to analyze and provide a basis for constitutional protection for salt farmers and determine the regulations that must be established at the regional level. This study uses doctrinal legal research with a statutory approach. The pattern of analysis used in a deductive way starting with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). The results in this study are the protection and empowerment of salt farmers already implied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a form of constitutionality. The form of regulations that must be formed by the regional government are regional regulations, regional head regulations and other policies. This study recommends areas that have salt ponds to form such regulations, namely local laws related to the protection and empowerment of salt farmers and regional head regulations such as regent regulations related to technical guidelines for the implementation of protection and empowerment of salt farmers, and optimization of the local salt industry and regional policies related to the team executor of empowering salt farmers.

Keywords: constitutionality; protection; empowerment, salt farmers; regulation

(Indeks Pengarang)
(*Author Index*)

Anggraeni, Meirina	11-23
Aprilia, Karina	65-75
Arthatiani, Freshty Y.	39-52
Ayunda, Nisa	1-10
Azizah	77-90
Deswati, Rismutia H.	39-52
Fauzan, Encik M.	77-90
Hidayat, Rahmad	65-75
Komala, Ratna.	65-75
Kusumastanto, Tridoyo	1-10
Muawanah, Umi	53-63
Muslih, Toha	25-38
Muthmainnah, Zahra.	65-75
Rustiadi, Ernan	11-23
Utami, Pratita B	65-75
Wardono, Budi	1-10
Yanti, Bayu V. I.	25-38
Yulianingsi, Indra	53-63
Yulianto, Gatot	77-90
Zulbainarni, Nimmi	1-10

(Indeks Subjek)
(Subject Index)

“mapak”	25-38
Bahan baku lokal	39-52
Ekonomi lokal	25-38
Flores	1-10
linput-output	11-23
Impor mackarel	39-52
Kearifan lokal ‘Papadak’	65-75
Kebijakan publik	65-75
Keterkaitan antar sektor	11-23
Konstitusionalitas	77-90
KUR	25-38
<i>Laut Sawu</i>	65-75
Model bioekonomi	1-10
Model fox	1-10
Pemberdayaan	77-90
Pengelolaan pesisi	65-75
Pengembangan wilayah	11-23
Perdagangan perbatasan	53-63
Perikanan	11-23
Perikanan	53-63
Perikanan skala kecil	25-38
Perlindungan	77-90
Petambak garam	77-90
Regulasi	77-90
Rote Ndao	65-75
Sebatik	53-63
Skalogram	11-23
SKPT	53-63
Sosek malindo	53-63
Strategi impor	39-52
Substitusi impor	39-52
Surplus produksi	1-10
Tengkulak	25-38
Tuna sirip kuning	1-10
Usaha pemindangan	39-52

JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TEBAL SECARA SINGKAT DAN JELAS, (Studi Kasus: apabila ada)

(12 pt, Arial Bold)

Judul Bahasa Indonesia

Judul Dibuat Dalam 2 Bahasa (Indonesia dan Inggris),

(12 pt Arial Bold)

Judul Bahasa Inggris

Penulis Pertama¹, Penulis Kedua², dstⁿ ← (Nama Penulis Tanpa gelar)

¹Instansi Penulis Pertama dan ²Instansi Penulis Kedua
dstⁿ....

(10pt, Arial))

e-mail: e-mail penulis pertama ← (berwarna hitam)

(10pt, Arial)

(9 pt, Arial)

ABSTRAK

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt, spasi antar baris 1.0..

Kata kunci: *panduan; penulis; jurnal* ← (*minimal 5 kata kunci*)

ABSTRACT

Written in Indonesian and English, no more than 250 words and only one paragraph. The abstract provides brief but clear information about the reason the study was conducted, the objectives to be achieved, the method used, the results obtained and the conclusions and policy of recommendation. Written in Arial, 10 pt, line and paragraph spacing 1.0.

Keywords: *guidence; author; journal* ← (*minimal 5 keywords*)

PENDAHULUAN

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan **menjelaskan arti penting, pernyataan masalah, tujuan, metoda yang digunakan yang dibuat secara ringkas**. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia. Naskah diketik dalam Microsoft Word dengan 1 kolom. Ukuran kertas A4 dengan ukuran panjang (*height*) 29,7 cm, lebar (*width*) 21 cm dengan dimensi

Top 3 cm, Bottom 3 cm, Right 2,5 cm, Left 2,5 cm, Gutter 1 cm. Jenis Huruf Arial 11 pt, dan spasi (*line spacing*) 1,5. Pada bagian ini memuat justifikasi arti penting dari topik yang diangkat, state of the art dari topik tersebut (apa fakta yang sudah ada ataupun hasil-hasil riset terdahulu, apa yang seharusnya ada dan apa yang masih menjadi isu dan permasalahan, tujuan penulisan topik tersebut diikuti dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut (kapan penelitian dilakukan, dimana, metoda apa yang digunakan serta data digunakan serta metoda analisisnya.

POKOK PEMBAHASAN I

POKOK PEMBAHASAN II

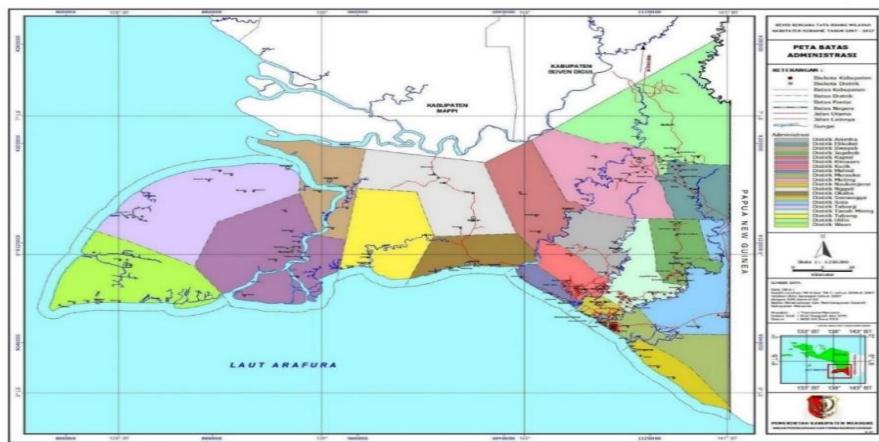
Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. Tabel dibuat ringkas dan diberi judul yang singkat tetapi jelas hanya menyajikan data yang esensial dan mudah dipahami. Tabel diberi catatan secukupnya, termasuk sumbernya, sehingga tabel mampu menjelaskan informasi yang disajikan secara mandiri. **Setiap tabel diberi nomor secara berurutan dan diulas di dalam naskah. Judul tabel diketik dengan jenis huruf Arial 10 pt, 9 pt pada bagian sumber dan pada tulisan “Tabel 1.” “Tabel 2.” dan seterusnya diketik tebal. Tabel menggunakan 2 (dua) Bahasa wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.** Tabel tidak boleh dalam bentuk gambar berupa file jpg, png, image dan harus dalam bentuk tabel yang dibuat di Microsoft word. Judul tabel dituliskan pada bagian atas tabel, rata kiri dan diberi tanda titik (.) pada akhir judul tabel.

Gambar, Grafik dan Foto harus tajam dan jelas agar cetakan berkualitas baik serta memiliki sumber dimana file tersebut diambil atau proses didapatnya data tersebut. Semua simbol di dalamnya harus dijelaskan. Seperti halnya tabel, keterangan pada gambar, grafik dan foto harus mencukupi agar tersaji secara mandiri. Gambar, grafik dan foto harus diulas di dalam naskah. Seluruh keterangan yang terdapat pada Gambar, Grafik, dan Foto wajib untuk menggunakan dua bahasa seperti pada tabel, yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Gambar, grafik dan foto memiliki kedalaman minimal 300 dpi.

Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

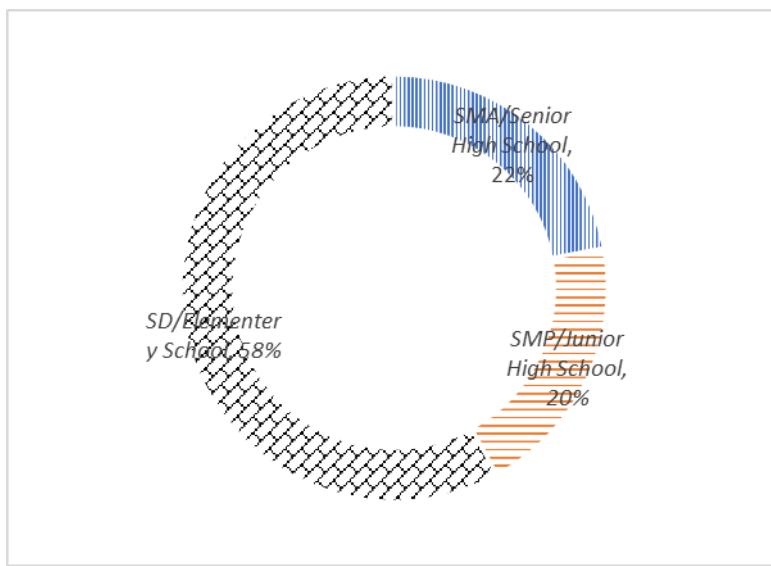
Kategori Nilai Ekonomi/ <i>Category Economic Value</i>	Total Nilai/ <i>Total value</i> (Rp/Tahun)	Total Nilai/ <i>Total value</i> (Rp/Ha/Tahun)
Nilai Guna Langsung/ <i>direct value</i>	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/ <i>Indirect Value</i>	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pewarisan/ <i>Value Inheritance</i>	2,728,107,120	269,496
<i>Total/ Total</i>	177,419,407,910	17,528,367



Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data

Figure 1. Location Data Collection

Sumber: www.merauke.go.id/Source: www.merauke.go.id



Gambar 2. Kerangka Modal Sosial

Figure 2. Framework of Social Capital

SINTESA POKOK BAHASAN 1.., n. (Sintesa Kebijakan)

Sintesa merupakan hasil dari gabungan pokok-pokok bahasan sehingga memberikan kesatuan analisis yang selaras berupa kebijakan yang disarankan. Sintesa diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok pembahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan. Sintesa yang menjawab pada setiap pokok pembahasan, ditulis secara singkat dan jelas dalam beberapa kalimat pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bagian ini peneliti menyajikan kesimpulan berupa kebijakan yang disarankan serta implikasinya. Implikasi kebijakan merupakan saran dari penulis apa yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan agar kebijakan yang disarankan tersebut dapat terlaksana. Format implikasi kebijakan harus berupa paragraf, tidak diperkenankan berupa *pointer* atau *numbering*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Pernyataan status terkait kontributor penulis (perlu dijelaskan status kontributor Utama dan Anggota) dan juga telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi hendaknya dari sumber yang jelas dan terpercaya. Setiap referensi yang tercantum dalam daftar pustaka harus dikutip (disitir) pada naskah dan sebaliknya setiap kutipan harus tercantum dalam daftar pustaka. Acuan penulisan sitasi menggunakan *APA citations style (American Psychological Association) – 6th edition*. APA merupakan “sistem penulis – Tahun”. APA memiliki beberapa edisi penulisan sitasi manual, yang tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam persiapan naskah.

Sitasi pada teks

Penulis Tunggal. Menurut Zamroni (2018) beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diambil untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah. **Atau**, beberapa aksi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan diversifikasi rumput laut untuk produk bernilai tambah (Zamroni, 2018).

2 (dua) Penulis. Dalam Zamroni & Istiana (2017) konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. **Atau**, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang (Zamroni & Istiana, 2017).

Tiga, empat, atau lima penulis. Cantumkan setiap penulis untuk pertama kali sitasi pada teks dirlisikan. Setelah itu, kutip hanya nama belakang yang pertama penulis diikuti oleh "et al. atau et al.,"

Contoh:

Penulisan sitasi pertama. Koeshendrajana, Mira, Anna, Nugroho, Muawanah, & Dewitasari (2018) Menemukan bahwa...

Penulisan kedua. Koeshendrajana *et al.* (2018) atau Koeshendrajana *et al.*, 2018.

Enam atau lebih penulis. Sitasi hanya pada nama terakhir penulis pertama, kemudian diikuti dengan “*et al.* atau *et al.*,”

Mohon sumber berupa Undang-undang, Peraturan pemerintah, Surat Keputusan dan sebagainya agar dimasukan kedalam daftar pustaka.

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. **Minimal daftar pustaka 25.**

Disusun berdasarkan abjad.

Contoh Penulisan Buku:

Nama Belakang Penulis, Inisial Pertama. (Tahun Publikasi). *Judul.* Kota, Singkatan Negara: Penerbit.

Zulham, A., Subaryono & Mahulette, R.T. (2017). *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Ternate dan Sekitarnya.* Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Jakarta, ID: PT Rajagrafindo Persada.

Contoh Buku Elektronik (e-book):

Carruthers, W. (Ed.) (2014). *Histories of Egyptology: Interdisciplinary measures.* Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com>

Contoh e-jurnal Ilmiah dengan doi:

Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A. & Adimu, H.E. (2018). *Pendekatan sistem sosial – ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.* Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikan, Vol 4(2), 61-74. doi: 10.15578/marina.v4i2.7389.

Contoh e-jurnal Ilmiah tanpa doi:

Cohen, A., Medlow, S., Kelk, N., & Hickie, I. (2019). Young people's experiences of mental health care: Implications for the headspace National Youth Mental Health Foundation. *Youth Studies Australia*, 28(1), 13-20. Retrieved from <http://www.acys.info/journal>.

Artikel dari situs internet;

World Wide Fund. (2019). *WWF Kembangkan Upaya Mitigasi Tangkapan Sampingan Penyu di Ujung Tenggara Pulau Sulawesi.* Retrieved from <https://www.wwf.or.id/?72583/WWF-Kembangkan-Upaya-Mitigasi-Tangkapan-Sampingan-Penyu-di-Ujung-Tenggara-Pulau-Sulawesi>.

Contoh Laporan di website:

Tang, Y., & Choo, X. (2009). *Intrinsic divergence for face recognition.* (CTN Technical Report 20090204-001). Centre for Theoretical Neuroscience: Retrieved from <http://compneuro.uwaterloo.ca/cnrglab>.

Contoh hasil membuat sifati dan daftar pustaka (bibliografi) menggunakan aplikasi:

(Muliawan & Firdaus, 2018)

Muliawan, I., & Firdaus, M. (2018). Nilai Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Wisata Peraiaran Kapoposang, Sulawesi Selatan Economic Value Of Coral Reef Ecosystem In The Kapoposang Marine Park Conservation , South Sulawesi. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol 13(No 1), 133–142.

Dokumen tambahan yang dibutuhkan (Jurnal atau Buletin Ilmiah):

1. surat pernyataan Clearance Ethics
2. Surat Pernyataan Kontribusi Karya Tulis Ilmiah

Dokumen tersebut terpisah dengan naskah KTI (karya tulis ilmiah) dan wajib diunggah/upload bersama dengan naskah KTI pada Open Journal System (OJS) yang ditambahkan dibagian **Supplementary File** (berbeda bagian dengan **unggah/upload** naskah). Template atau format Dokumen telah disediakan oleh redaksi jurnal yang terdapat pada sisi kanan website OJS (dapat diunduh/download).



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung BRSRM KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : <https://kkp.go.id/brsdm/sosek>
email : kebijakan.sosek@gmail.com

ISSN 2089-6980

9 772089 698058